

## Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kawasan Danau Toba

**Ahkamil Hakim**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[aahkamilhakim@gmail.com](mailto:aahkamilhakim@gmail.com)

**Nur Ahmadi Bi Rahmani**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[nurahmadi@uinsu.ac.id](mailto:nurahmadi@uinsu.ac.id)

**Rahmat Daim Harahap**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id](mailto:rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kawasan Danau Toba. Selama ini yang menjadi masalah sehingga Danau Toba tidak memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat yang hidup di sana dan hanya dinikmati oleh segelintir orang, dan tidak memberikan dampak yang cukup besar bagi negara adalah masalah infrastruktur Danau Toba yaitu masalah pembangunan sarana dan prasarana yang menjadi pusat tumbuhnya perekonomian dari 4 kabupaten yang mengelilingi kawasan Danau Toba tidak berkembang dengan baik. Metode Penelitian ini adalah Kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dokumen laporan dan peraturan perundangan-undangan yang dipergunakan untuk mengelaborasi dan menjawab permasalahan penelitian yang diangkat, yaitu urgensi peran pemerintah dalam pengembangan wisata berkelanjutan di Sumatera Utara. Hasil penelitian adalah Pemerintah sebagai fasilitator yaitu meningkatkan atau menyediakan sarana dan prasarana penunjang bagi wisatawan. Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat peraturan dan kebijakan dalam pengelolaan pariwisata. Peran pemerintah sebagai motivator yaitu masih belum optimal, oleh karena itu motivasi diperlukan berupa sosialisasi, pelatihan maupun dana stimulant agar dapat mengembangkan pengelolaan pariwisata di Danau Toba. Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Danau Toba yaitu pengembangan secara berkelanjutan memiliki kontribusi pada *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan atas pemanfaatan sumber daya alam, ekonomi, dan kearifan lokal dengan menganut tiga aspek yaitu *economic* (prosperity), *ecological* (planet), dan *social & cultural* (people).

**Kata Kunci** *Pariwisata, Pemerintah, Peran*

**I. PENDAHULUAN**

Pariwisata adalah fenomena atau gejala kemasyarakatan yang menyangkut tentang manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan dan lain sebagainya yang merupakan kajian sosiologis. Definisi pariwisata yang bersifat umum adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sangat banyak sekali tempat-tempat pariwisata yang bagus yang tidak kalah menarik jika di bandingkan dengan provinsi lain (Ahmad, 2019).

Danau Toba juga sebagai salah satu daerah di provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi-potensi pariwisata yang cukup banyak yang dapat dikembangkan lebih serius, salah satu objek wisata yang sedang di kembangkan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir (Ahmad, 2019).

Secara historis, tujuan pemerintah serta asosiasi industri dalam hal upayanya mengembangkan potensi dalam sektor pariwisata adalah untuk menjadikan sektor pariwisata tersebut sebagai sumber penghasilan dan mampu menciptakan lapangan kerja. Akhir-akhir ini pemerintah menyadari bahwa potensi pada sektor pariwisata adalah sebagai alat membangun perekonomian suatu daerah dimana sektor pariwisata berada. Sumatera utara yang memiliki potensi pariwisata, tentu saja harus memanfaatkan keadaan ini untuk membangun perekonomian daerahnya (Siregar, 2019).

Letak geografis kawasan Danau Toba terletak di pegunungan Bukit Barisan Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba terletak di pulau Sumatera 176 Km arah Selatan Kota Medan, dan merupakan danau terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Di atas danau terdapat sebuah pulau yaitu pulau Samosir. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah 4 wilayah administrasi pemerintahan kabupaten di sekitaran Danau Toba yaitu kabupaten Samosir, kabupaten Toba Samosir, kabupaten Simalungun, kabupaten Tapanuli Utara, yang membagi wilayah perairan danau toba (Sentanu, 2020).

**Tabel 1. Objek wisata yang ada di 4 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba**

KABUPATEN	OBJEK WISATA
Tapanuli Utara	1. Pulau Sibandang
	2. Rura Silindung
	3. Pemandian Air Panas
	4. Kolam Air Soda
	5. Salib Kasih
Samosir	1. Pusuk Buhit
	2. Batu Persidangan
	3. Tomok
	4. Desa Ambarita
	5. Desa Tuktuk
	6. Danau Sidihoni
	7. Pemandian Air Panas Pangururan
Simalungun	1. Parapat
	2. Tigaras
	3. Pematang Purba

	4. Haranggaol
	5. Rumah Adat Simalungun
	6. Batu Gantung
	7. Tunjang Unta
Toba Samosir	1. Balige
	2. Pantai Lumban Silintong
	3. Air Terjun Sampuran
	4. Museum Batak

Pengelolaan kawasan danau toba memang sangat di perlukan untuk meningkatkan daya jual pariwisata daerah ini yang nantinya akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat sekitar. Langkah yang di buat oleh pemerintah dengan membentuk badan otoritas pengelola kawasan danau toba di harapkan dapat mempercepat pembangunan di kawasan ini (Sentanu, 2020).

Danau Toba ( Negeri Indah Kepingan Surga ) merupakan salah satu objek wisata unggulan Sumatera Utara dan menjadi salah satu dari 10 Destinasi yang akan di kembangkan oleh pemerintah. Pemerintah menjadikan Danau Toba salah satu wisata Indonesia yang akan diangkat menjadi destinasi wisata dunia agar menjadi wisata internasional modern Monaco of Asia (Ahmad, 2019).

Selama ini yang menjadi masalah sehingga Danau Toba tidak memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat yang hidup di sana dan hanya dinikmati oleh segelintir orang, dan tidak memberikan devisa yang cukup besar bagi negara adalah masalah infrastuktur Danau Toba yaitu masalah pembangunan sarana dan prasarana yang menjadi urat nadi tumbuhnya perekonomian dari 4 kabupaten yang mengelilingi kawasan Danau Toba tidak berkembang dengan baik (Rohyani, 2019).

Infrastuktur di kawasan Danau Toba sangat buruk, jalan menuju Danau Toba baik dari arah Medan ke Karo, Dairi, Silalahi, Kepangururan, Dolok Sanggul, Samosir, semuanya rusak, sempit, rawan longsor, tidak rata, tanpa trotoar, dan penerangan jalan yang mengakibatkan rawan kecelakaan. Sejalan dengan program pemerintah yang akan menjadikan daerah wisata Danau Toba menjadi destinasi wisata dunia dan mempercepat pembangunan infrastuktur di Danau Toba dan penguatan konektifitas dan aksibilitas, seperti bandara, jalan dan jembatan, dan pelabuhan, listrik, maka terbentuklah sekarang Badan Otoritas Danau Toba (BODT) (Ahmad, 2019).

Pembangunan jalan tol antara Medan-Siantar-Parapat dengan jarak sekitar 116 Km dan pembangunan jalan tol Medan- Deli Serdang- Seribu Dolok dan Tongging-Danau Toba sekitar 94 Km bias menghemat waktu 3 jam lebih dari kondisi sekarang (Budi Sitorus, 2020).

Pengembangan bandara Sibisa kecamatan Ajibata yang berada di kawasan Danau Toba sehingga jika ini dibangun akan menghemat waktu wisatawan dengan waktu penerbangan 35 menit dari bandara Kuala Namu. Diharapkan pembangunan Danau Toba bertaraf Internasional akan memebrikan multi efek pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar (Budi Sitorus, 2020). Penataan yang mulai digarap pemerintah di pantai bebas (Parapat), pelabuhan Ajibata dan Tomok ( samosir) harus berjalan lancar. Semua pihak harus merapatkan barisan untuk mewujudkan Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia. Dapat juga menjadi sarana utnuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan angka kesempatan kerja.

Menurut data statistik dari BPS, angka kemiskinan di kabupaten sekitar kawasan Danau Toba kabupaten Samosir menempati angka tertinggi sebesar 13,20% dari jumlah

penduduknya, kemudian disusul oleh kabupaten Simalungun 10,20%, Tapanuli Utara 11,06%, Humbahas 9,44%, Toba Samosir 9,23% Karo 9,20%, dan disusul kabupaten Dairi 8,40% dari jumlah penduduknya. Danau Toba mempunyai sejuta keindahan dibalik kegetiran yang menyimpan persoalan-persoalan didalamnya. Perspalkan kerusakan ekosistem menjadi persoalan utama seperti kehadiran berbagai industry di kawasan Danau Toba yang seiring diikuti hilangnya hak rakyat atas ekosistem yang aman dan nyaman yang pada akhirnya meningkatkan peristiwa gagal panen. Ketimpangan ekonomi juga menjadi sebuah persoalan ketika kebijakan pembangunan lebih berpihak kepada pengusaha serta terkikisnya identitas local dengan pembangunan yang berorientasi pada modernisasi yang pada akhirnya meningkatkan kemiskinan ditengah masyarakat karena kebijakan pembangunan yang tidak pro kepada rakyat miskin (Badan Pusat Statistik, 2021).

Potensi wisata danau toba jauh lebih kuat dan hebat jika semua punya semangat untuk maju dan menjadikan kawsan Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia. Danau vulkanik terbesar didunia, Danau Geopark yang akan diusulkan di UNESCO, dan punya pulau seluas negara Singapura semua adalah potensi yang bisa mansejahterakan masyarakat SUMUT dari sector pariwisata (Taufik Wal hidayat, 2019).

Dari segi aksebilitas penataan Danau Toba di fokuskan ditiga lokasi, pantai bebas (Parapat), pelabuhan Ajibata, dan Tomok (Samosir) masuk kedalam radar kawasan yang akan ditata. Apabila dibandingkan dnegan kawasan wisata di daerah dan dinegara lain misalnya HANGJAOU untuk di Parapat akan dilakukan penataan pedestrian. Kontruksi bawahnya akan di desain dari metrial yang mampu bertahan lama. Jalanpun akan dibuat cukup lebar sehingga pejalan kaki bisa nyaman berlalu lalang disekitar danau, penanaman vegetasi juga akan dilakukan. Pohon-pohon besar dan rindang akan ditata rapi penataannya juga akan diselaraskan dengan pedestrian yang dibangun setelah itu, kawasan ini juga akan mendapatkan tambahan toilet ramah lingkungan. Ini merupakan bagian dari pelayanan kepada wisatawan sekaligus memberi contoh kepada masyarakat soal budaya bersih (Taufik Wal hidayat, 2019).

Sejalan dengan usaha untuk meningkatkan perekonomian daerah, maka pemerintah daerah Danau Toba Provinsi Sumatera Utara di haruskan memiliki kemampuan untuk dapat mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki wilayahnya secara lebih efektif dan efesien. Salah satu potensi ekonomi yang di miliki daerah Danau Toba adalah dalam sektor Pariwisata (Mali, 2021).

Dengan demikian, signifikansi dari upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata sangat jelas. Oleh karena itu mengedepankan paradigma pembangunan yang inklusif, partisipatoris dan berkelanjutan dalam pemulihan sektor ini merupakan keniscayaan. Pariwisata berkelanjutan telah menjadi kecenderungan (*trend*) global dewasa ini (Ridlo, 2021). Oleh karenanya Indonesia pun tidak dapat menegasikan kecenderungan ini bila ingin menjaga ataupun meningkatkan daya saing internasionalnya di sektor ini. Paradigma pembangunan pariwisata berkelanjutan pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai proses dan tujuan pembangunan di sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi secara integral juga dapat mengedepankan aspek kesejahteraan sosial, khususnya yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat lokal, terutama kelompok-kelompok marjinal seperti perempuan, anak dan masyarakat adat, dan lebih dari itu mampu melindungi kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Ketiga kepentingan ini harus dilihat secara holistik dan integral. Pentingnya paradigma pembangunan pariwisata berkelanjutan ini pada dasarnya juga sejalan dengan agenda pembangunan global atau SDGs (*Sustainable Development*

*Goals*), terutama pada aspek pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perubahan iklim, perlindungan ekosistem darat dan lautan serta kemitraan multipihak. Apalagi, telah membuat pencapaian target-target SDGs mengalami set-back yang cukup signifikan. Pemulihan sektor pariwisata yang memiliki banyak keterkaitan erat dengan aspek sosial dan lingkungan diharapkan dapat ikut serta mendorong pencapaian target-target SDGs (Munavizt, 2020).

Sejalan dengan usaha untuk meningkatkan perekonomian daerah, maka pemerintah daerah Kawasan Danau Toba di haruskan memiliki kemampuan untuk dapat mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki wilayahnya secara lebih efektif dan efisien. Salah satu upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan yaitu Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs), SDGs memiliki berapa hal yang harus dilaksanakan yaitu Menjaga kualitas lingkungan. Memberikan keuntungan kepada masyarakat lokal dan wisatawan. Menjaga hubungan, keharmonisan antara masyarakat lokal, kebutuhan wisatawan dan lingkungan. Berdasarkan penjelasan diatas SDGs belum terlihat dalam pengembangan wisata Danau Toba. Dari uraian tersebut penulis ingin mengetahui sejauh mana kontribusi peran pemerintah untuk sektor pariwisata berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk itulah penulis berusaha untuk membahas masalah ini menjadi sebuah jurnal penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kawasan Danau Toba”

## II. LANDASAN TEORI

### A. 1. Peran Pemerintah

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya (Revi Arfamaini, 2019).

Dari sudut pandang yang lain, peranan ialah tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa (Jufrizen, 2018). Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan (Imsar, 2019). Fungsi pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta di bebaskan oleh masyarakat. Peran pemerintah yang dimaksud anatara lain (Winartuti, 2018) :

#### 1. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator memiliki suatu masalah tentang pemerintah belum menyiapkan fasilitator yang cukup untuk mengelola tempat wisata, pemerintah kurang memberikan motivasi kepada masyarakat mengenai bagaimana mengelola pariwisata.

#### 2. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator memiliki suatu masalah tentang peraturan yang belum cukup baik untuk menciptakan objek wisata. Regulator belum menjamin tempat wisata yang baik. Pemerintah belum menyiapkan peraturan tentang

wisatawan tidak boleh menebang pohon, wisatawan tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan wisatawan tidak boleh mengganggu satwa.

3. Peranan pemerintah sebagai motivator

Peran pemerintah sebagai motivator memiliki suatu masalah tentang pemerintah kurang melakukan sosialisasi tentang bagaimana cara mengembangkan potensi pariwisata alam.

## 2. Parawisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara objek wisata merupakan tempat yang menjadi pusat daya tarik dan dapat memberikan kepuasan khususnya pengunjung (Bintania, 2020).

Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan pengunjung karena mempunyai sumberdaya, baik alami maupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, candi-candi, tari-tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya (Harian Netral RSS Feed, 2022). Menurut Siregar, objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata, objek wisata sangat erat hubungannya dengan daya tarik wisata. Daerah yang merupakan objek wisata harus memiliki keunikan yang menjadi sasaran utama apabila berkunjung ke daerah wisata tersebut. Keunikan suatu daerah wisata dapat dilihat dari budaya setempat, alam dan flora fauna, kemajuan teknologi dan unsur spiritual (Kadir, 2020).

Kualitas objek wisata tidak hanya dapat dinilai dari kondisi objek wisata itu sendiri, namun dilihat juga dari fasilitas, pelayanan, jasa, pemasaran, dan aksesibilitas yang mendukung objek wisata tersebut. Penilaian pengunjung terhadap objek wisata yang ada dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan objek wisata dimasa yang akan datang (Daim, 2022). Dalam pengembangan pariwisata hendaknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengunjung agar pengunjung merasa puas dengan apa yang diberikan dan membuat pengunjung lebih lama bertahan ditempat tersebut dan juga ingin berkunjung kembali ke tempat tersebut (Rinawati, 2018). Pengembangan objek wisata menjadi acuan sebagai sumber penghasilan utama bagi setiap daerah. Objek dan daya tarik wisata merupakan suatu bentuk dan fasilitas yang berhubungan dan dapat menarik minat pengunjung atau pengunjung untuk datang kesuatu daerah atau tempat tertentu.

Daya tarik yang belum dikembangkan merupakan sumberdaya potensial dan belum dapat disebut sebagai daya tarik wisata, sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu (Reni Ria Armayani Hasibuan, 2021). Objek dan daya tarik wisata merupakan dasar dari kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik di suatu daerah atau tempat tertentu, kepariwisataan sulit untuk dikembangkan (Tarigan, 2019). Suatu objek wisata harus meningkatkan kualitas objek menjadi lebih baik guna mendapatkan persepsi positif. Karena persepsi terhadap kualitas objek wisata yang dapat menjadi tolok ukur untuk melihat tingkat mutu suatu objek wisata. Kualitas objek wisata merupakan salah satu unsur penentu dalam menarik pengunjung berkunjung. Suatu objek wisata memiliki ketergantungan antara atraksi, fasilitas, infrastruktur, transportasi dan layanan (Khairina Tambunan, Isnaini Harahap, 2019). Hal ini tentu saja sangat menentukan apakah suatu objek tersebut layak dikunjungi atau tidak. Suatu objek wisata memerlukan infrastruktur dan transportasi untuk mengunjungi tempat tujuan wisata. Selain itu, ketersediaan

fasilitas juga penting dalam menyediakan kebutuhan pengunjung selama berada jauh dari tempat tinggalnya (Tarigan, 2019b).

Pariwisata merupakan segala bentuk perjalanan yang berhubungan dengan kegiatan rekreasi yang bertujuan mengisi waktu luang dengan bepergian ke satu tempat atau lebih (Sarasanti, 2019). Berdasarkan Undang-Undang No. 109 Tahun 2009 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh pengunjung, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata dianggap sebagai suatu aset strategis untuk mendorong pembangunan pada wilayah-wilayah tertentu yang mempunyai potensi objek wisata (Sarasanti, 2019).

Pariwisata berkembang layaknya perkembangan zaman yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan konsumennya. Sumbangan pariwisata masih merupakan alternatif dalam mempercepat pembangunan di berbagai negara dan daerah yang tidak memiliki keunggulan komparatif di sektor industri (Munavizt, 2020). Pembangunan pariwisata pada umumnya diarahkan sebagai sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, memperluas lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pengunjung.

Industri pariwisata berlomba-lomba menciptakan produk wisata sesuai dengan tujuan pembangunan pariwisata yaitu untuk mengenalkan keindahan alam, kebudayaan dan adat istiadat (Najmi, 2021). Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi pilihan bagi negara-negara berkembang dalam rangka mewujudkan pengunjung yang sejahtera dan makmur di samping sektor lain. Indonesia dengan keanekaragaman budaya, kekayaan alam serta keramahmataman penduduknya merupakan potensi dalam kepariwisataan dan sebagai salah satu negara tujuan pariwisata dunia (Najmi, 2021).

Pariwisata berasal dari asal kata wisata dengan kata kerjanya berwisata artinya bepergian atau melancong untuk bersenang-senang. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Menurut undang – undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, disebutkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata (Rahayu, 2022).

### **3. Sustainable Development Goals (SDGs)**

Konsep SDGs merupakan hasil dari kegiatan konferensi di Rio de Janeiro yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2012 berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Konferensi ini diselenggarakan dengan maksud dapat mencapai tujuan bersama yakni mampu menjaga keseimbangan tiga hal pokok dalam pembangunan berkelanjutan meliputi lingkungan, sosial dan ekonomi (Alisjahbana, 2021).

Guna mencapai tiga hal pokok dalam pembangunan berkelanjutan tersebut SDGs mempunyai 5 asas utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan untuk mewujudkan tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa pengentasan kemiskinan, mencapai kesetaraan serta mengatasi perubahan iklim. Demi mencapai tiga tujuan mulia tersebut disusunlah 17 tujuan global berikut ini (Alisjahbana, 2021).

Ke-17 tujuan global dari SDGs tersebut di antaranya: 1) tanpa kemiskinan. Seluruh dunia harus terbebas dari belenggu kemiskinan. 2) tanpa kelaparan. Kelaparan tidak terjadi lagi, ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mempertahankan budidaya

pertanian yang berkelanjutan. 3) kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang memadai tanpa pandang usia serta mendorong kesejahteraan hidupnya. 4) pendidikan berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam dunia pendidikan. 5) Kesetaraan gender. Mengikutsertakan kaum ibu dan perempuan dalam setiap kegiatan yang bermanfaat sehingga kesetaraan gender dapat tercapai. 6) air bersih dan sanitasi. Memastikan semua orang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. 7) energi bersih dan terjangkau. Semua orang dapat mengakses sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern. 8) pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Perkembangan ekonomi semakin pesat dan lapangan kerja tersedia untuk semua orang sehingga mampu mendapatkan kehidupan yang layak. 9) industri, inovasi dan infrastruktur. Industri dan infrastruktur berkembang pesat, berkualitas, penuh inovasi dan berkelanjutan. 10) mengurangi kesenjangan. Mewujudkan kesetaraan di seluruh Negara di dunia (Alfajri, 2020).

11) keberlanjutan kota dan komunitas. membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, aman, berkualitas, berketahanan serta berkelanjutan. 12) konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Keberlangsungan konsumsi serta pola produksi terjamin. 13) aksi terhadap iklim. Melakukan tindakan yang cepat dalam mengatasi perubahan iklim dan mengantisipasi dampaknya. 14) kehidupan bawah laut. Menjaga kelestarian laut dan mempertahankan eksistensi sumber daya laut demi perkembangan pembangunan berkelanjutan. 15) kehidupan di darat. Menjaga kelestarian ekosistem darat, mengelola dan memperhatikan kelestarian hutan, memulihkan degradasi tanah dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. 16) institusi peradilan yang kuat dan kedamaian. Menciptakan perdamaian dalam masyarakat, akses keadilan tersedia bagi semua orang maupun lembaga tanpa pandang bulu, membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh lapisan. 17) menjalin kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan. Memperkuat implementasi dan membangkitkan kembali kerjasama global demi mencapai pembangunan berkelanjutan (Alfajri, 2020).

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini dijelaskan urgensi peran pemerintah dalam pengembangan wisata berkelanjutan di Sumatera Utara, lalu kemudian dilakukan analisis strategi dengan menggunakan pendekatan Sustainable Development Goals (SDGs). Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah yang dapat memiliki pengaruh besar pada pengembangan wisata berkelanjutan di Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dokumen laporan dan peraturan perundangan-undangan yang dipergunakan untuk mengelaborasi dan menjawab permasalahan penelitian yang diangkat (Tarigan, 2019), yaitu urgensi peran pemerintah dalam pengembangan wisata berkelanjutan di Sumatera Utara, dan strategi pengembangan wisata berkelanjutan pada tataran atau skala provinsi. Selanjutnya, data-data tersebut diolah dan dilakukan analisis secara deskriptif analitis dan disintesis sehingga dapat mengelaborasi dan menjawab permasalahan penelitian (Rahmani, 2018).

### **IV. HASIL PENELITIAN**

#### **Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan di Kaawasan Danau Toba**

Danau Toba memiliki keragaman potensi daya tarik wisata, baik potensi kesenian, sejarah dan budaya, serta kehidupan masyarakat. Dari sekian banyaknya aktifitas wisata yang dijumpai di Danau Toba, yang menarik perhatian adalah wisata alam dan budaya masyarakat yang masih di pertahankan sampai saat ini. Akan tetapi pemerintah tetap berusaha untuk menjadikan pariwisata Danau Toba sebagai ikon Sumatera Utara yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara.

Wisata di Danau Toba perlu dikembangkan sebagai salah satu destinasi tempat wisata favorit masyarakat Sumatera Utara pada khususnya. Oleh karena itu dalam mengembangkannya, ada cita-cita yang ingin diwujudkan. Cita-cita ini merupakan alasan filosofis keberadaan suatu organisasi atau lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, dimana alasan filosofi tersebut berkaitan yang gambaran tentang apa yang akan terjadi dan menjadi arah atau pegangan dalam mewujudkan cita-cita yang selaras dan berkesinambungan.

Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata berperan untuk memberdayakan sumber daya yang langka serta menjadikan industri pariwisata dapat diperpanjang siklus hidupnya dan berkelanjutan. Dalam pengembangan strategis pariwisata dan kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemandu kepentingan termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili kepentingan lingkungan dan masyarakat, serta wisawatan sendiri.

Pelibatan stakeholder dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan kebijakan mungkin menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebuah keharusan mengakomodasi seluruh masukan atau pendapatan dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam hal indentifikasi masalah, keterlibatan dan resolusi konflik. Kerangka stakeholder telah diterapkan dalam hubungannya dengan siklus hidup daerah tujuan wisata dalam rangka menganalisis sikap terhadap pemangku kepentingan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan.

Potensi pariwisata pada tahapan identifikasi dan menunjukkan destinasi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik atau destinasi wisata karena di dukung oleh keindahan alam yang masih alam, daya tarik wisata alamiah masih sangat asl, pada sisi lainnya telah ada kunjungan wisatawan dalam jumlah kecil dan mereka masih leluasa dapat bertemu dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan penduduk lokal. Karakteristik ini cukup untuk dijadikan alasan pengembangan sebuah kawasan menjadi sebuah destinasi atau daya tarik wisata.

### **1. Sebagai fasilitator**

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal.

#### **a) Membangun sarana dan prasarana**

Dari observasi, pelayanan pemerintah dalam pengelolaan Wisata di Danau Toba terdapat masyarakat (pengunjung), pengelola wisata memiliki inisiatif tersendiri untuk menyediakan sarana dan prasarana. Dari hasil wawancara dengan Kepala Upt Dinas Pariwisata mengatakan bahwa: “ Disini pemerintah itu sangat mempunyai inisiatif yang

sangat besar untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang mampu memberikan kenyamanan bagi pengunjung seperti gasebo dan boulevard dll.

Berdasarkan pemerintah dalam pengelolaan wisata di Danau Toba yaitu seperti menyediakan sarana dan prasarana penunjang bagi wisatawan. Pariwisata bisa didefinisikan sebagai suatu ketertarikan terhadap sesuatu hasil kebudayaan dan tata cara hidup suatu masyarakat, kekhasan suatu daerah atau panorama alam yang jarang dijumpai di daerah (negara) lain. Dengan demikian maka kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya motivasi orang tertentu untuk datang berkunjung. Adanya pengunjung ini akan menciptakan suatu kondisi yang mengakibatkan terjadinya pertukaran barang atau informasi yang telah memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat setempat.

Pemerintah mempunyai peran penting dalam pembangunan wisata di Danau Toba. Dalam hal ini pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur seperti menyediakan sarana dan prasarana seperti toilet dan kasebo. Dari hasil wawancara dengan Kepala Upt Dinas Pariwisata sebagai berikut: “ Dalam hal pembangunan pengelolaan meningkatkan pembangunan secara fisik seperti membangun sarana dan prasarana seperti toilet juga meningkatkan daya tarik wisatawan dengan cara pengadaan saran penataan taman dan promosi serta perencanaan pengadaan pembangunan sarana taman baca (tahap perencanaan).

Bahwa pembangunan di tempat pariwisata di Danau Toba ini telah diadakan toilet namun perlu juga diadakan promosi agar tempat wisata dapat diketahui oleh masyarakat dan pengguna internet. Namun sistem promosi yang dijalankan pada kepariwisataan Danau Toba hanya sekedar sistem promosi dengan melalui media telekomunikasi dan media cetak.

#### b) Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pengelolaan tempat pariwisata di Danau Toba masih memiliki banyak kekurangan dalam hal pengelolaannya. Namun masyarakat tetap berusaha untuk selalu menjaga keindahan dan kebersihan tempat pariwisata di Danau Toba. Pengelolaan tempat pariwisata di Danau Toba tidak terlepas dari campur tangan masyarakat. Dalam hal ini Upt pariwisata di Sumatera Utara berharap agar masyarakat yang ada disekitar tempat pariwisata di Danau Toba tetap menjaga keindahan dan kebersihan. Oleh karena itu harus ada kerja sama pemerintah dan masyarakat karena masyarakatlah yang akan menjaga dan membersihkan tempat pariwisata di Danau Toba tersebut.

Program pengelolaan tempat pariwisata di Danau Toba merupakan hal yang sangat penting demi meningkatkan kualitas tempat pariwisata di Danau Toba dan meningkatkan jumlah pengunjung pada tempat pariwisata di Danau Toba tersebut. Namun pengelolaan tempat pariwisata di Danau Toba ini masih sederhana. Dalam hal ini pemerintah Kawasan Danau Toba menyusun program pengelolaan tempat pariwisata di Danau Toba sebagai berikut:

1. Program pengembangan nilai budaya.
  - a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
  - b. Penatagunaan naskah kuno daerah.
  - c. Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah.
  - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya.
2. Program pengelolaan kekayaan budaya
  - a. Fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.
  - b. Pelestarian fisik dan dukungan bahan pustaka termasuk naskah kuno.
  - c. Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah.

d. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pengelolaan objek wisata, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat disekitar lokasi adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan lebih jauh potensi-potensi objek wisata yang dimiliki dalam menunjang kepariwisata di Sumatera Utara.
2. Mempromosikan objek-objek wisata tersebut melalui media elektronik, media cetak, ataupun dari individu ke individu lain.
3. Membangun segala fasilitas yang dibutuhkan oleh para wisatawan dalam kegiatan liburan, agar wisatawan merasa aman, nyaman dan akhirnya berkeinginan untuk berkunjung kembali.
4. Meningkatkan kemampuan serta keahlian sumber daya manusia (SDM) dalam hal memberikan pelayanan kepada wisatawan.

## 2. Sebagai regulator

Peran sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan.

a. Aturan retribusi karcis/tiket pengunjung

Retribusi merupakan pungutan biaya yang di pungut sesuai aturan-aturan yang telah ditentukan Daerah, atau retribusi merupakan pendapatan atau pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh jasa yang disediakan. Dari hasil observasi, setiap pengunjung yang datang ke rata-rata tempat pariwisata di Danau Toba wajib membayar uang tiket, untuk orang dewasa wajib membayar sebesar Rp 5.000/orang dewasa dan Rp 3.000/untuk anak- anak. Dari hasil wawancara dengan mengatakan bahwa: “ Pengunjung yang datang di tempat pariwisata di Sumatera Utara wajib membayar uang tiket sesuai dengan aturan yang telah di tentukan seperti, orang dewasa dikenakan Rp 5.000/orang dan untuk anak-anak Rp 3.000/orang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa setiap masyarakat/pengunjung yang datang di tempat pariwisata di Danau Toba wajib membayar tiket se sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan adanya retribusi bagi pengunjung maka bisa mendapatkan PAD, bahkan saat ini sudah bisa menghasilkan PAD dengan retribusi Rp 5.000/orang dewasa dan 3.000/orang untuk anak-anak.

b. Aturan larangan membawah senjata tajam dan obat terlarang

Danau Toba Sumatera Utara merupakan objek wisata unggulan di Sumatera Utara, untuk memasuki kawasan Danau Toba Sumatera Utara pengunjung dilarang membawah benda tajam dan obat-obat terlarang. Untuk memasuki Danau Toba Sumatera Utara pengunjung dilarang membawah senjata tajam, karena benda tersebut bisa saja membahayakan diri sendiri bahkan orang lain, begitu pula dengan obat-obat terlarang pengunjung dilarang membawah obat-obat terlarang ketika memasuki Danau Toba Sumatera Utara karena seperti yang diketahui bahwa menggunakan obat terlarang akan dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

## 3. Sebagai motivator

Peran pemerintah sebagai motivator adalah sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Sebagai

motivator, pemerintah sebagai stakeholder tempat pariwisata di Danau Toba dibutuhkan perannya dalam rangka memotivasi masyarakat, investor, dan pengusaha wisata. Pentingnya kesadaran masyarakat di Danau Toba akan pentingnya pariwisata menuntut peran Pemerintah Sumatera Utara agar terus memberikan motivasi, baik itu berupa sosialisasi, pelatihan maupun dana stimulant. Motivasi juga perlu untuk terus diberikan kepada para investor dan pengusaha wisata di Danau Toba agar tertarik mengembangkan usaha wisatanya di Danau Toba, dan secara tidak langsung juga dapat meringankan beban anggaran dari Pemerintah Danau Toba dalam rangka pengembangan potensi pariwisata di Danau Toba.

### **Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kawasan Danau Toba**

Pengembangan program pariwisata di Danau Toba dapat memberikan dorongan bagi pembangunan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip pengelolaan yang menguntungkan serta melibatkan masyarakat setempat. Selain itu, program pariwisata dapat memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat dalam menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Upaya pengembangan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan harus diarahkan agar dapat memenuhi aspek ekonomi, sosial dan estetika yang sekaligus dapat menjaga keutuhan dan atau kelestarian ekologi, keanekaragaman hayati, budaya serta sistem kehidupan di Danau Toba.

Pada tataran ideal, program pariwisata harus mampu berkomitmen pada visi pariwisata sebagai alat untuk transformasi positif, pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Selain itu juga, sebuah harus mampu mempromosikan dan melindungi alam dan budayanya serta menghargai gastronomi, kerajinannya dan orang-orangnya. Dalam tingkatan lainnya, sebuah daerah harus mampu membina inovasi dan kewirausahaan, memberdayakan masyarakat, serta bekerja untuk kesejahteraan penduduk dan kenyamanan pengunjung. Karakteristik program pariwisata memiliki konsep integrasi antara atraksi, akomodasi, dan pemenuhan fasilitas pendukung dalam suatu struktur masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi.

Pengembangan program pariwisata secara berkelanjutan diharapkan dapat menjamin keberlangsungan atau keberadaan sumberdaya alam, ekonomi, dan kearifan lokal. Konsep tersebut memberikan manfaat jangka panjang kepada perekonomian lokal tanpa merusak lingkungan dan tetap memperhatikan aspek sosial budaya. Pembangunan pariwisata berkelanjutan harus menganut 3 aspek yaitu economic (prosperity), ecological (planet), dan social & cultural (people). Untuk menjamin keberlangsungan pariwisata berkelanjutan, pengembangan desa wisata seyogianya diselaraskan dengan tujuan pelaksanaan dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Berikut ini adalah kontribusi pengembangan program pariwisata dalam agenda pencapaian TPB/SDGs sebagaimana terlihat pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Peran Pemerintah Wisata Dalam Program Pariwisata TPB/SDGs**

No.	Sustainable Development Goals	Target	Deskripsi
1.	SDGs 1. Mengurangi Kemiskinan	Target 1.4	menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
2.	SDGs 4. Pendidikan Berkualitas	Target 4.4	meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
3.	SDGs 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	Target 6.6	melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.
4.	SDGs 8. Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	Target 8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
		Target 8.9	menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
5.	SDGs 10. Berkurangnya Kesenjangan	Target 10.2	memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
6.	SDGs 11. Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan	Target 11.4	Melindungi warisan budaya dan warisan alam serta membuat masyarakat bangga pada wilayahnya
		Target 11.a	Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
7.	SDGs 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Target 12.2	mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.
8.	SDGs 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan	Target 17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

Berdasarkan tabel 1 di atas, terdapat 8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang masuk dalam program pengembangan Program Pariwisata dengan 10 target pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung keberlangsungan pembangunan berkelanjutan tersebut, perlu dilakukan secara bersama-sama antar pemangku kepentingan agar dapat berkembang secara seimbang. Terkait dengan usaha pencapaian TPB/SDGs, tren pariwisata bergeser ke arah pelibatan masyarakat setempat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pariwisata.

Dengan adanya SDGs Program Pariwisata, maka arah tujuan pembangunan wisata di Danau Toba akan lebih terarah dan terukur untuk mewujudkan Program Pariwisata Berkelanjutan. Pengembangan Peran Pemerintah dalam Program Pariwisata dalam kerangka SDGs, adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata

2. Promosi wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital
3. Pelatihan pengelolaan program wisata;
4. Pengelolaan wisata;
5. Kerja sama dengan pihak ketiga untuk investasi wisata;
6. Kegiatan pengembangan wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan yang diputuskan dalam musyawarah.

## V. KESIMPULAN

Pemerintah sebagai fasilitator yaitu meningkatkan atau menyediakan sarana dan prasarana penunjang bagi wisatawan. Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat peraturan dan kebijakan dalam pengelolaan pariwisata. Peran pemerintah sebagai motivator yaitu masih belum optimal, oleh karena itu motivasi diperlukan berupa sosialisasi, pelatihan maupun dana stimulant agar dapat mengembangkan pengelolaan pariwisata di Danau Toba.

Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Danau Toba yaitu pengembangan secara berkelanjutan memiliki kontribusi pada Sustainable Development Goals (SDGs), yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan atas pemanfaatan sumber daya alam, ekonomi, dan kearifan lokal dengan menganut tiga aspek yaitu economic (prosperity), ecological (planet), dan social & cultural (people).

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut; Diperlukan adanya perbaikan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana pariwisata. Perlu adanya pengawasan, untuk menunjang kenyamanan pengunjung terhadap penerapan regulasi pada pengelolaan pariwisata di Danau Toba. Sosialisasi berupa dana maupun promosi dibutuhkan agar menarik minat pengunjung, yang secara otomatis berdampak pada pengembangan objek wisata Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2019). *Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pengembangan Pariwisata Danau Toba*. Radar Medan. <https://radarmedan.com/peran-pemerintah-daerah-terhadap-pengembangan-pariwisata-danau-toba>
- Alfajri. (2020). Pelatihan dan Pemberdayaan Tunas Sustainable Development Goals (SDGs) Siswa Tingkat SMA/MA Sederajat Di Kota Pekanbaru Untuk Mewujudkan Tujuan Sustainable Cities And Communities Dan Responsible Consumption And Production. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(2), 11.
- Alisjahbana, A. S. (2021). Menyongsong SDGS Kesiapan Daerah-Daerah Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 8(2), 11.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Indonesia 2021, 1101001, 790*. BPS.
- Bintania, S. R. (2020). *Manajemen Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sumatera Utara Dalam Mengembangkan Jaringan Kewirausahaan Kampus*. UIN Sumatera Utara.
- Budi Sitorus, C. N. S. (2020). Peran transportasi dalam mendukung kawasan strategis pariwisata nasional danau toba. *Jurnal Manajemen Transportasi*, 7(2), 11.
- Daim, R. H. (2022). The effect of occupational health and safety to employee performance in the sawmills industries in Langkat, North Sumatra, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 912(1), 11.
- Harian Netral RSS Feed. (2022). *Pengertian bisnis dan Tujuan Bisnis*. Harian Netral RSS Feed. <https://hariannetral.com>

- Imsar. (2019). *Analisis Strategi Pengembangan Usaha Ucok Durian Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Jufrizen. (2018). Peran Motivasi Kerja dalam Memoderasi Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Inovasi*, 4(1), 11.
- Kadir, A. (2020). *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*. Amzah.
- Khairina Tambunan, Isnaini Harahap, M. (2019). Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *Jurnal Aktsar*, 2(2), 2.
- Mali, M. G. (2021). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Era New Normal di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Aplikasi Visiting Jogja. *Jurnal Pariwisata*, 2(1), 11.
- Munavizt, S. (2020). *Manfaat Pariwisata dari Berbagai Segi*. Pariwisata Blogspot.
- Najmi, N. (2021). *Dampak Positif dan Negatif Pariwisata*. Shesagitariusgirl.Blogspot.
- Rahayu, S. (2022). *Aspek-aspek Ekonomi Pariwisata*. Ekonomi Blogspot.
- Rahmani, N. A. B. (2018). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. FEBI UIN-SU Press.
- Reni Ria Armayani Hasibuan. (2021). Relevansi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pembinaan Umat Islam. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 5(1), 11.
- Revi Arfamaini, T. S. (2019). Peran Pengawas Dalam Menerapkan Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 29(2), 11.
- Ridlo, M. A. (. (2021). *Implementasi Pelayanan Syariah Pada Biro Perjalanan Wisata OTW Tour*. IAIN Kudus.
- Rinawati. (2018). *Implementasi Marketing Mix Pada Manajemen Pemasaran Supermarket Pamella Satu Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. Universitas Islam Indonesia.
- Rohyani, I. S. (2019). PEGEMBANGAN POTENSI WISATA MELALUI OPTIMALISASI PERAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DESA ARJANGKA. *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram*, 6(3), 11.
- Sarasanti, A. (2019). *Pengertian Pariwisata*. Blog Spot. <http://anggunsarasanti.blogspot.com/2012/10/pengertian-pariwisata-softskill-anggun.html>. [17
- Sentanu, I. G. E. P. S. (2020). Memperkuat Peran Pemerintah Daerah: Mengelola Pariwisata Lokal Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 11.
- Siregar, R. A. (2019). Pengembangan kawasan pariwisata danau Toba (pada wilayah studi: kabupaten Toba Samosir provinsi Sumatera Utara). In *Universitas Tri Sakti*. Universitas Trisakti.
- Tarigan, A. A. (2019a). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU*. FEBI UIN-SU Press.
- Tarigan, A. A. (2019b). *Etika dan Spritualitas Bisnis*. FEBI UIN-SU Press.
- Taufik Wal hidayat, I. N. (2019). Persepsi Publik Tentang Destinasi Pariwisata Danau Toba Sebagai Global Geopark Kaldera UNESCO. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(2), 11.
- Winartuti, W. (2018). *Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah*. Gramedia Widiasarana Indonesia.